

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran desa Margahurip dalam pelaksanaan kebijakan desa tanggap COVID-19 sebagai bentuk pencegahan penularan dan penanganan COVID-19 di antaranya membentuk relawan desa lawan COVID-19 dengan struktur sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020. Tugas dari relawan tersebut seperti melakukan pemantauan terhadap setiap siapa orang yang keluar dan masuk ke desa melalui pos pantau yang berada di setiap dusun, mengedukasi seluruh warga masyarakat desa melalui sosialisasi untuk selalu disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan, dan juga menyediakan vaksin untuk seluruh masyarakat desa. Selain berbagai upaya dilakukan untuk meminimalisir penularan COVID-19, pemerintah desa juga memberikan bantuan baik tunai maupun non tunai, dan sembako untuk seluruh warga desa yang memenuhi syarat jenis bantuan, dan bantuan yang dibagikan tersebut berasal dari penggunaan dana APBDes.
2. Penghambat pelaksanaan kebijakan dalam pemulihan dampak Covid-19 juga sebagian besar berasal dari masyarakat. Masyarakat banyak yang masih menginginkan bantuan sosial dari pemerintah padahal status ekonomi mereka masih mencukupi. Dalam pelaksanaan vaksin

juga kurangnya respon dari masyarakat yang notabene masih tabu akan pemahaman tentang vaksin mengakibatkan kendala dalam pencapaian target yang ditentukan pemerintah untuk vaksin. Tidak ada hambatan dari pemerintah selain masalah administrasi keuangan.

## **B. Saran**

1. Peran pemerintah Desa Margahurip dalam penanganan Pandemi Covid-19 harus dilakukan secara massif melalui program strategis yang dirancang secara komprehensif supaya melibatkan berbagai eksponen masyarakat.
2. Masyarakat desa Margahurip diharapkan memberi dukungan kepada program-program yang dikeluarkan pemerintah Desa agar terciptanya kondisi kesehatan, dan ekonomi yang terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Buku Saku Pendataan BLT Dana Desa

Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2016.

Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011.

Gibson, *Organisasi Perilaku-Struktur-Proses*, Terjemahan, edisi V, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2002

Hanoatubun, "*Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*", EduPsyCouns, Universitas Muhammadiyah Enrekang, Sulawesi Selatan, 2020

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St Paul Minn : West Publishing, 1990)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018

Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Lasbang Mediatama, Yogyakarta, 2008

Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2002

Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif*, Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017

Soekanto, *Teori Peran*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002

Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada,  
Jakarta, 2001

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta,  
Bandung, 2013

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Presiden No. 104 tahun 2021 tentang rincian APBN tahun  
anggaran 2022

Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Berskala  
Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan  
Desa;

Peraturan Menteri Desa No. 1 tahun 2015 tentang tentang Pedoman  
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal  
Berskala Desa;

Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan  
Dana Desa;

Peraturan Menteri Desa PDTT No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas  
Penggunaan Dana Desa tahun 2022

Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

Surat Edaran No. 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid;

### C. Sumber Lain

Bima Baskara, “*Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19*”, Kompas, 22 Desember 2021, diakses tanggal 14 Januari 2022, pukul 12.00 WIB

Kemenkeu.go.id/Publikasi/Berita/ UU No. 2 Tahun 2020 Bukti Hadir Negara Berikan Perlindungan Terhadap Dampak Covid-19

Nur Rozuqi, “Kewenangan Pemdes Dalam Mengelola Pemerintahan”, simpeldesa.com, Senin 04 April 2022, 13.50 WIB

Rudiyanto, “*Pengaruh Covid-19 Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Sustainability Talk: Menjaga Momentum Pencapaian SDGs Pasca Corona*”, Jakarta, 2020

Sugiman, *Pemerintah Desa*, Vol. 7 No. 1, Juli 2018

World Bank, “*Global Economic Prospects*”, Worldbank.org, 4 Februari 2022 09.00 WIB